BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas/sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap program, rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalahdisebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-programpembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebihmengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan

proses pembangunan, terutama di tingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*Top down*), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan.

Ditambah kemiskinan dipandang sebagai suatu identitas yang melekat dengan pedesaan, walaupun berbagai upaya mengenai pengentasan kemiskinan ini sudah lama diusahakan bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri, namun persoalan-persoalan yang melanda perdesaan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pedesaan sulit untuk keluar dari permasalahan, beberapa persoalan yang turut menyumbang adanya kemiskinan pedesaan perlu diidentifikasi, diuraikan dan dipelajari agar dapat memahami permasalahan pedesaan secara lebih mendalam. Pengidentifikasian akar persoalan dan berbagai potensi yang dimiliki perdesaan merupakan langkah awal yang sangat penting, identifikasi mengenai penyebab atau simpul-simpul terjadinya persoalan akan menjadi landasan yang akan membantu perumusan solusi penanganan yang tepat dan menerobos lingkaran hambatannya.

Di Kabupaten Bandung sendiri pemberdayaan masyarakat merupakan masalah yang cukup besar dan kompleks, besar karena menyangkut jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,93% (sumber dari BPS 2008) dan kompleks karena terkait dengan berbagai permasalahan krusial, antara lain degradasi sumberdaya

alam, minimnya sarana dan prasarana penunjang pedesaan. Angka harapan hidup yang masih relatif tinggi serta jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Namun partisipasi masyarakat belum secara langsung memberi dampak pada kemandirian masyarakat, hal ini tampak dari jumlah penduduk miskin ± 10.656 KK per kecamatan. Pencapaian IPM Kabupaten Bandung sampai tahun 2009 adalah 72,5 meliputi angka Harapan Hidup (AMH) 98,84%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,86 Tahun (Data BPS tahun 2008).

Di era desentralisasi dan keterbukaan, untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan sudah saatnya masyarakat desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut dimulai sejak perancangan/ penentuan aktivitas, pelaksanaan hingga evaluasinya. Pihak luar desa misalnya pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan usaha dapat memberi kontribusi dengan mengacu pada *grand design* yang dibuat oleh masyarakat desa. Sudah saatnya masyarakat pedesaan ikut berpartisipasi di dalam pembangunan, masyarakat lokal merupakan pihak yang paling mengerti mengenai persoalan yang mereka alami sehari-hari, sehingga dapat memberikan masukan bagi solusi pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat guna.

Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat mempunyai peranan penting dalam hal ini, oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki sikap yang lebih tanggap dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan karena pemerintah daerah lebih

mengenal kelebihan dan kekurangan akan masyarakat daerahnya sehingga pemerintah daerah bisa merumuskan program yang tepat, ditambah pembangunan perdesaan didorong untuk mengembangkan potensinya agar dapat memajukan wilayahnya secara mandiri, ditunjang dengan anggaran yang proporsional dari APBD Pemerintah Kabupaten Bandung.

Melihat masalah yang ada di Kabupaten Bandung maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 dalam rangka pencapaian visi Kabupaten bandung yang salah satu misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 Tentang Hibah dan Bantuan, maka berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan sarana prasarana di desa sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian di desa wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik dan berinisiatif guna melakukan penulisan mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

DAYEUHKOLOT KECAMATAN DAYEUHKOLOTKABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 (Suatu Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi lingkungan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009 ?
2. Bagaimana hubungan antarorganisasi pelaksana kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009?
3. Bagaimana sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan Program Penguatan PembangunanPerdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari diadakannya penulisan ini adalah untuk mengetahui, Implementasi Kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2009.

Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui hubungan antarorganisasi pelaksana kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Kegunaan dari kerja praktek ini adalah :

1. Bagi Penulis
   a) Menambah wawasan penulis baik secara teoritis maupun praktis tentang kompensasi di dalam instansi pemerintah atau suatu perusahaan
   b) Mengembangkan ilmu yang telah didapat sehingga dapat diaplikasikan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
   c) Menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.
   d) Mengetahui segala proses pekerjaan di bidang Pembangunan tempat kegiatan kerja praktek penulisditempatkan.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

   Diharapkan dapat berguna bagi pemerintah setempat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai tolak ukur kegiatan operasional dalam menganalisis kompensasi.

3. Bagi Perguruan Tinggi

   a) Membekali kemampuan dasar yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia pekerjaan.

   b) Meningkatkan kualitas program praktek kerja lapangan para mahasiswanya.

   c) Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar agar memberikan kuliah yang relevan dengan dunia kerja disamping itu mutu akademisnya.

   d) Membina hubunan kemitraan antara perguruan tinggi dan Instansi terkait dalam sarana dan prasarana pendidikan

1.5 Kerangka Pemikiran

Suatu negara memerlukan suatu kebijakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

> “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk

> mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Wahab, 1997:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. M.Irfan Islamy juga mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*pengertiannya sebagai berikut :

"Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah" (Islamy, 1997:14).

Berdasarkan pengertian di atas suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul*Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut :

> "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (Dunn, 2003:132).

Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan, kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplimentasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Kamus Webster dalam Wahab, 2005:64).

Berdasarkan pengertian di atas implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*yaitu:

> "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"(Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001:192).

Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak

yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

> “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (*output*) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana, yang saling menyesuaikan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/ merealisasikan program yang telah

disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, faktor- faktor tersebut diantaranya :

1. Kondisi lingkungan
   Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi
   Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
   Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
   Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

(G. Shabbir dan Dennis dalam Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur

oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkungannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas (Subarsono, 2005:109).

Berdasarkan Pengertian di atas terdapat empat faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, akan tetapi hanya tiga indikator yang dijadikan penulisan hal ini di sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di BPMPD Kabupaten Bandung yaitu 1) Kondisi Lingkungan, 2) Hubungan antar organisasi, dan 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.

Pertama, Kondisi Lingkungan, merupakan salah satu keberhasilan dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Kondisi lingkungan tersebut adalah sumber daya manusia yang berada di daerah Desa Dayeuhkolot dalam

pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang pada prakteknya melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2009.

Kedua, Hubungan antar organisasi, yaitu hubungan atau koordinasi terhadap pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang dilaksanakan di Desa Dayeuhkolot apakah antara tim dari Kabupaten, Kecamatan ataupun Tim dari Desa Dayeuhkolot berjalan dengan baik, tidak ada hambatan terhadap pelaksanaanya dalam hal pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2009.

Ketiga, Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, yaitu keberhasilan suatu kebijakan harus adanya dukungan pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot agar pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2009 dapat berjalan dengan lancar.

Pengertian Implementasi kebijakan sudah di jelaskan selanjutnya akan di jelaskan pengertian dari Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah :

> “Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah Program pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur yang kegiatannya pelaksanaannya diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)”. (Perbup Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanan P4 Di Wilayah Kabupaten Bandung).

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk memelihara

keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.

Program P4 dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang infrastruktur, melalui partisipasi masyarakat dan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri.

Implementasi Kebijakan dan P4 telah dijelaskan di atas, selanjutnya pengertian Pembangunan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar,* pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual maupun secara material, yang mencakup seperangkat cita-cita meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan harus bersifat rasionalistis, haluan yang diambil harus didasarkan pada fakta, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang singkron.
2. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan artinya, adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam satu sistem.
3. Peningkatan produktifitas.
4. Peningkatan standar kehidupan.
5. Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat yang sama dibidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

6. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat mencakup; efisiensi, kerajinan/ketekunan, keteraturan, ketetapan, kesederhanaan dan kecermatan, ketelitian dan kejujuran, bersifat rasional dalam mengambil keputusan, siap menghadapi perubahan, giat dan menggunakan kesempatan yang benar, integritas dan dapat berdiri sendiri, bersikap kooperatif. (Soerjono, 2000:454)

Pembangunan merupakan suatu aspek dan ruang lingkup yang luas dalam arti pembangunan itu mencakup segala segi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan merupakan jalan/sarana usaha mencapai hasil kearah tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang dalam rangka mencapai cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pada umumnya pembangunan merupakan suatu usaha menuju pada keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu yakni berupa perubahan-perubahan yang direncanakan dengan mendayagunakan segala potensi yang ada, baik potensi alam, manusia, sosial dan budaya. Hal ini harus digali dan dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin.

Pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya menurut, I Nyoman Beratha dalam buku yang berjudul *Masyarakat dan Pembangunan Desa* adalah:

> “Bahwa pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha perbaikan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam manusia dan sosial inilah yang disebut pembangunan potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti tanah, sumber air, mineral dan potensi manusia berupa penduduk yang besar

> jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut diatas semaksimal mungkin". (Beratha, 1982:65).

Berdasarkan pendapat tersebut, pembangunan merupakan usaha perbaikan kearah yang lebih baik dari pada sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimal mungkin.

Pengertian berikutnya tentang infrastrukturyang dikemukakan oleh Robert menyebut istilah Infrastruktur dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, pengertiannya sebagai berikut :

> Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Robert, 2005:8)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastrukur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Robert, 2005:9). Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Berdasarkan pengertian Infrastruktur di atas, bahwa infrastruktur merupakan salah satu keberhasilan suatu pembangunan yang berpengaruh terhadap sistem sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pengertian desa menurut Raharjdo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian* mengemukakan pengertian desa yaitu :

> “Desa dalam arti umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama.” (Rahardjo, 1999: 28)

Pengertian desa berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 yaitu :

> “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kesimpulan desa dari beberapa tokoh-tokoh diatas, maka penulis akanmemberikan pengertian yang dimaksud dengan desa adalah suatu komunitas masyarakat kecil yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagain besar sebagai petani serta berhak mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.

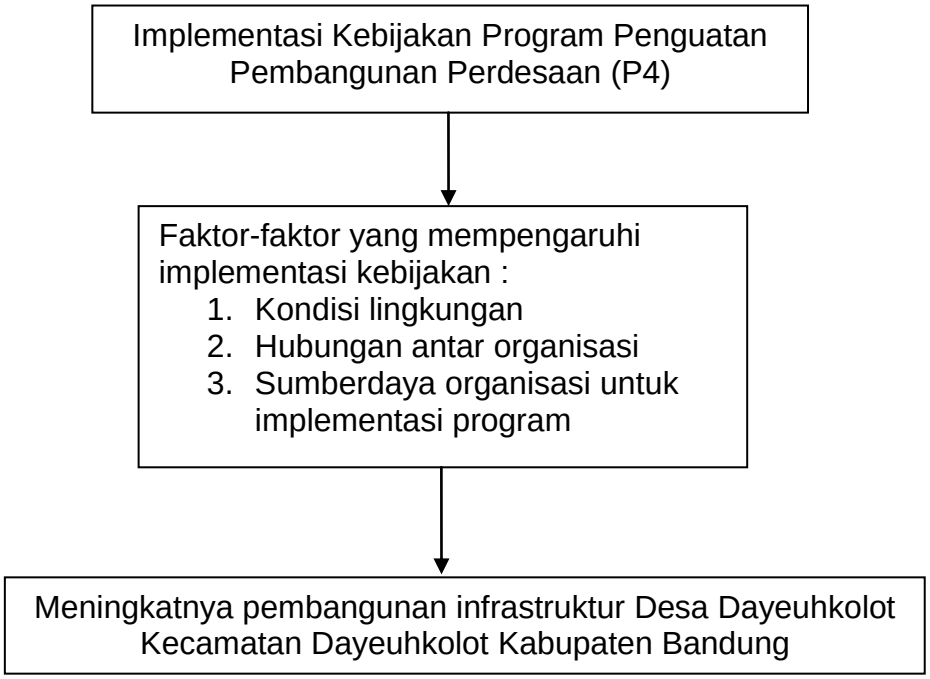
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi adalah Suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang terarah dan tepat sasaran.
2. Kebijakan adalahpemahaman dan pelaksanaan suatu program yang menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat agar sesuai dengan harapan yang diinginkan.
3. Implementasi Kebijakan adalah Pengarahan terhadap tindakan-tindakan pemerintah ataupun individu untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
    a. Kondisi Lingkungan adalah keadaan lingkungan pendukung pelaksanaan kebijakan yang salah satunya adalah sumber daya manusia.
    b. Hubungan antar organisasi adalah koordinasi atau kerjasama pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
    c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program adalah bahwa setiap organisasi pelaksana harus berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya keuangan.
4. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah Program pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur.
5. Pembangunan adalah suatu usaha perbaikan untuk mencapai hasil kearah tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.

6. Infrastruktur adalahBangunan yang dikembangkan sebagai pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
7. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukumberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan KKL

1.6.1 MetodeLaporan KKL

Setiap penulisan harus direncanakan untuk itu diperlukan suatu metode penulisan, metode penulisan merupakan rencana dan rancangan cara pengumpulan data dan menganalisa agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penulisan. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamayan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif karena dalam penulisan ini penulis hanya akan memaparkan situasi-situasi dalam program Penunguatan Pembangunan Perdesaan (P4). Menurut Burhan Bungin yang berjudul *Metodologi Penulisan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Metode penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai berikut:

> “Penulisan yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai *variable* yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun *variable* tertentu. Penulisan deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian” (Bungin, 2001:124).

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penulisan Kualitatif*, bahwa metode penulisan kualitatif adalah:

> “Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*”.(Sugiyono, 2007:1)

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penulisan kualitatif tidak menekankan pada *generalisasi*, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penulisan yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penulisan serta penulis merupakan instrumen kunci dalam sebuah penulisan yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini melalui:

1. Studi Pustaka,

Yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan program penguatan pembangunan perdesaan dalam meningkatkan pembangunan infrastrukturdi Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan,laporan kegiatan atau dokumen yang tersedia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung.

2. Observasi *(Observation),*

Yaitu Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan instansi atau lembaga dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penulisan. Observasi dilakukan penulis dengan memperhatikan proses implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dalam meningkatkan pembangunan infrastrukturdi Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penulisan Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.(Sugiyono, 2007:92-99).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penulisan dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Waktu Laporan KKL

Lokasi Kuliah Kerja Lapangan bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha Desa (BPMPD) yang beralamat di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang, Telp. (022) 5897432.

Waktu Kuliah Kerja Lapangan dilakukan selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2010. Adapun jadwal Laporan KKLadalah dari bulan Juli sampai dengan bulan November sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Tahun 2010				
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Mengajukan surat ke BPMPD					
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan					
3	Pengumpulan data					
4	Analisis Data					
5	Penulisan laporan					
6	Pengumpulan laporan					